

KONSTRUKSI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL BAGI ANAK JALANAN DALAM MENGEMBANGKAN *SMART AND GOOD CITIZEN*

Wildan Nurul Fajar, Ratna Kartika Wati

Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This study concerned on the condition of the dynamics growing problems of beggar in Banyumas, mainly related to the behavior of those who tend to be far from the values and morals. Until now the government has not been able to carry out the development of beggar is based on values and moral development. The methodology of this study is qualitavie research which used grounded theory. The data collections are documents, interview and observation. The results showed that the Guidance has not touched ethics and behavior issues that become a part of the problems of beggar. Citizenship education has a role as an educational and moral basic can be a solution for beggar become good and smart citizens. Based on these conclusions canbe recommended to the government and otherrelevant parties, is expected to make a charge of Citizenship Education in the implementation guidance and moral values to beggar will contribute to the development of good and smart citizen.

Keywords: *Civic Education, Education and Moral Values, Beggar, Good and SmartCitizen.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi sorotan berkenaan dengan masalah sosial adalah kehadiran anak jalanan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Departemen Sosial “anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya”. Anak jalanan selama ini selalu identik dengan ketidaktertiban. Di mana-mana anak jalanan ini selalu menjadi objek penertiban. Kebanyakan mereka diarahkan untuk menghuni panti-panti yang telah didirikan oleh pemerintah. Namun jumlah mereka dari tahun ke tahun tidak pernah menyusut. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tahun 2006 terdapat 150 ribu anak jalanan di Indonesia dan diperkirakan terjadi peningkatan kuantitas hingga saat ini. Di Kabupaten Banyumas pun terjadi gejala demikian. Berdasarkan data Sub Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas, tahun ini menunjukkan jumlah anak usia sekolah yang berada di jalanan Purwokerto terdapat sekitar 723 anak jalanan, padahal tahun 2000 hanya terdapat sekitar 354 anak. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong bagi seorang anak untuk terjun dan bergabung menjadi anak jalanan. Selain minimnya keuangan dari keluarga, anak juga dijadikan pekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka masih dikatakan di bawah umur.

Mayoritas mereka adalah anak putus sekolah bahkan ada yang tidak pernah menikmati bangku sekolah sama sekali. Padahal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan; "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki kecakapan intelektual dan kemandirian yang dapat digunakan untuk mencari nafkah dan memperbaiki perspektif masa depan. Akibatnya mereka seakan tidak terdidik.

Interaksi anak-anak di jalan membuat mereka rentan terhadap perlakuan kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak yang hidup di jalan sangat berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam asuhan orang tuanya. Anak-anak di jalan hidup secara bebas. Mereka bebas melakukan apa saja yang mungkin belum patut dilakukan anak-anak seumuran mereka. Umumnya terlihat berpakaian lusuh, kumal, dandanan jauh dari kesan rapi hingga tato menghiasi tubuh mereka. Rokok, minuman keras, dan mabuk-mabukan sepertinya sudah umum dilakukan anak-anak seusia mereka yang seharusnya mengenyam pendidikan di sekolah. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Kelompok Studi Pinggiran (KSP) Biyung Emban, diperoleh data yang sungguh mencengangkan. Menurut kelompok yang *concern* dalam pembinaan anak jalanan di Purwokerto ini, "sekitar 90% anak jalanan di Purwokerto dan sekitarnya pernah melakukan hubungan seks". Akibatnya, tidak sedikit anak jalanan mengidap penyakit kotor seperti sifilis. Dalam fenomena di masyarakat pun sering kali anak jalanan melakukan tindakan-tindakan kriminal, baik tindakan kriminal yang tergolong ke dalam tindak kriminal ringan maupun tindak kriminal berat. Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan sebagian besar kelompok masyarakat mengasingkan mereka dan melakukan penolakan di setiap kehadiran mereka. Masyarakat tidak menganggap mereka sebagai bagian dari warga masyarakat dan mencap mereka sebagai penyakit masyarakat. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan jauh dari kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Keadaan ini membentuk jiwa anak-anak jalanan menjadi keras dan terkadang timbul kesan jauh dari nilai dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Diperlukan formula yang tepat dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, terutama berkaitan dengan permasalahan yang cukup mendasar ini, yaitu permasalahan nilai dan moral. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang salah satu misinya sebagai pendidikan nilai dan moral, harus mampu berperan untuk menjadi solusi dari masalah nilai dan moral yang hidup subur di tengah-tengah lingkungan anak jalanan. Keterlibatan PKn dalam masalah ini menjadi langkah strategis karena pada dasarnya PKn memiliki peran sebagai wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter. Secara makro PKn juga merupakan wahana sosio-pedagogis pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi fungsi pendidikan nasional yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional, PKn secara substantif-pedagogis menyentuh semua esensi tujuan pendidikan nasional mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, ahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. PKN sebagai pendidikan nilai memiliki kontribusi terhadap semua substansi tujuan pendidikan nasional tersebut, terutama dalam terciptanya *smart and good citizen*.

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah "bagaimana konstruksi pendidikan nilai dan moral bagi anak jalanan dalam pengembangan *smart and good citizen*". Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai pelaksanaan pendidikan nilai dan moral kepada anak jalanan dan implikasinya terhadap terciptanya warganegara yang cerdas dan baik. Sementara tujuan khusus dari penelitian yakni untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral bagi anak jalanan dalam mengembangkan *smart and good citizen*; model penanganan terhadap persoalan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait termasuk hambatan dalam penanganan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut; serta konstruksi pendidikan nilai dan moral yang dibutuhkan oleh anak jalanan dalam mengembangkan *smart and good citizen*.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif (Strauss dan Corbin, 2009:4). Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode *grounded theory* yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori *grounded* yang disusun secara induktif tentang suatu fenomena. Temuan penelitiannya merupakan rumusan teori tentang realitas yang diteliti, bukan sekedar sederet angka atau sejumlah tema yang kurang berkaitan. Melalui metodologi ini tidak hanya dihasilkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep, namun juga dilakukan pengujian sementara terhadap konsep ini. Tujuan metode *grounded theory* adalah menyusun teori yang sesuai dan menjelaskan tentang bidang yang diteliti (Strauss dan Corbin, 2009:12). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *grounded theory* memberikan peluang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Beberapa alasan yang mendasari penggunaan metode *grounded theory* dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: pertama, sesuai dengan permasalahan bagaimana kompetensi yang diperlukan bagi pengembangan model PKn sebagai media pendidikan nilai dan moral. Kajian ini bersifat konseptual teoretik tentang filsafat keilmuan khususnya menyangkut epistemologi. Kedua, setelah dibahas melalui analisis data yang peneliti lakukan, diharapkan peneliti dapat menemukan teori-teori *grounded* atas penelitian yang peneliti lakukan secara epistemologi tersebut, mengingat dalam penelitian ini diperlukan kepekaan yang dalam untuk menyingkap makna yang dituangkan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian ataupun informan.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Terkait dengan penentuan subjek dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 2007:57; Alwasilah, 2003:145-146). Kriteria pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data, yakni pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Kantor LSM yang menangani masalah anak jalanan di Purwokerto dan tempat diselenggarakannya kegiatan pembinaan anak jalanan di Purwokerto. Sementara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, tidak menutup kemungkinan bahwa tempatnya disesuaikan dengan keinginan narasumber yang bersangkutan. Kriteria kedua, pelaku, yang dimaksud adalah anak jalanan di sekitar Purwokerto, aktivis yang peduli terhadap anak jalanan, pejabat terkait dan pakar yang berlatar keilmuan terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan serta banyak menaruh perhatian yang tinggi terhadap pendidikan nilai dan moral. Kriteria ketiga adalah peristiwa, yang dimaksud adalah pandangan, pendapat dan penilaian tentang pendidikan nilai dan moral bagi anak jalanan dalam menciptakan warganegara yang baik yang disampaikan secara individual baik dalam kegiatan pertemuan, seminar atau lokakarya yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan nilai dan moral dan pembinaan anak jalanan. Kriteria keempat adalah proses, yang dimaksud adalah peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian berkenaan dengan pendapat dan pandangannya terhadap fokus masalah dalam penelitian ini. Sementara analisis data terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul menggunakan analisis data induktif. Analisis data tersebut mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007:16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Anak Jalanan di Purwokerto

Ada tiga kategori tindakan anak jalanan yaitu mencari kepuasan, mencari nafkah, dan tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan tersebut biasanya dilakukan di

tempat mereka mangkal sehari-hari yakni alun-alun, terminal, stasiun, perempatan jalan, pasar, pertokoan dan tempat keramaian lain. Anak jalanan di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Purwokerto, tidak semua berdomisili di Purwokerto. Sebagian dari mereka adalah pendatang dari tetangga kota Purwokerto. Adapun mereka yang asli Purwokerto kebanyakan adalah warga dari Kampung Sri Rahayu atau orang Purwokerto sendiri lebih mengenalnya dengan Kampung Dayak. Sementara yang berdomisili di Banyumas adalah anak-anak pemungut koin yang berasal dari Daerah PAGERALANG. Alasan anak jalanan turun ke jalan lebih sering dipengaruhi oleh desakan kehidupan keluarga. Beberapa dari mereka turun ke jalan disertai dengan ibu mereka atau bersama kakaknya. Alasan yang ditemui bahwa mereka turun ke jalan karena ingin membantu orang tua mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak jarang anak-anak dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengais rizki karena ternyata profesi ini benar-benar menguntungkan bagi mereka. Pendapatan yang mereka terima dari bekerja dengan cara ini berkisar antara 30 sampai 50 ribu per harinya. Anak-anak disuruh untuk terjun mengemis ataupun mengamen di jalan sementara orang tua mereka mengawasi dari kejauhan. Ada beberapa dari mereka yang sudah mengikuti pembinaan dari pemerintah namun banyak dari mereka yang terjun lagi ke jalan sesudah selesai pembinaan (Smara Wuri Laksmi, 23 tahun, Purwokerto). Ini dapat diartikan bahwa pembinaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tidak dapat menjadi solusi berkurangnya anak-anak yang berprofesi sebagai anak jalanan.

2. Model Penanganan terhadap Persoalan Anak Jalanan yang Dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga-Lembaga Terkait.

Di Kabupaten Banyumas, berbagai kebijakan pemerintah kota dalam menangani anak telah dilakukan dengan berbagai cara penanganan, antara lain dengan memasukkan ke rumah singgah, tempat-tempat pelatihan, serta dengan memberi bekal keterampilan kepada mereka (Suwartono, 54 tahun, Purwokerto). Upaya penanganan anak jalanan juga dilakukan secara preventif dengan harapan agar jumlah anak jalanan dapat berkurang. Namun dalam kenyataannya jumlah anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan belumlah berkurang, bahkan mereka yang telah ditangani akan kembali lagi ke jalan atau berpindah tempat menjadi anak jalanan di tempat lain. Pembinaan selama ini pun tidak membuat perubahan perilaku anak jalanan kearah yang lebih baik, padahal etika dan perilaku tersebut menjadi salah satu bagian dari permasalahan yang melekat pada diri anak jalanan selama ini. Hal ini terjadi karena pembinaan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh persoalan nilai dan moral.

Penanganan masalah anak jalanan selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1990 tentang *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang hak anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara tanggung jawab penanganannya berada di bawah Departemen Sosial RI. Di Kabupaten Banyumas tanggung jawab penanganan anak jalanan ada pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi

Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyumas, seksi rehabilitasi tunasosial pada bidang pembinaan dan pengembangan sosial mengemban tugas khusus dalam menangani persoalan anak jalanan. Hal ini sesuai dengan rincian tugas pokok seksi rehabilitasi tuna sosial yaitu menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (anak jalanan, anak nakal, remaja rawan narkoba, remaja putus sekolah, pemulung, pengemis, gelandangan, orang terlantar, eks napi, wanita tunasusila/waria) melalui kegiatan pemberian santunan, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam rangka berkurangnya permasalahan tuna sosial.

Menurut Suwartono (54 tahun, Purwokerto) selaku kasi rehabilitasi sosial, dalam pelaksanaannya seksirehabilitasi sosial melakukan pendataan terhadap anak jalanan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas untuk kemudian mengusulkan penyelenggaraan program pembinaan anak jalanan sesuai kebutuhan anak jalanan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pada tataran teknisnya penyelenggaraan program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu LSM ataupun yayasan pembinaan anak jalanan yang telah dilegalisasi oleh Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyumas. Yayasan yang sejak dulu selalu melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyumas yaitu Yayasan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga Kuncup Mas yang beralamat di Jl. Mesjid 236 Pekunden RT 03 RW 02, Kec. Banyumas 53192. Yayasan ini membawahi bidang-bidang yang salah satunya adalah RPSA Anak Jalanan.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas selama ini secara berkala selalu mempercayai Yayasan Kuncup Mas untuk menyalurkan bantuan dari Pemerintah ataupun melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Banyumas. Yayasan Kuncup Mas pada tahun 2011 kemarin telah menangani pembinaan terhadap 35 orang anak jalanan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyumas (Agus Subekti, 70 tahun, Banyumas). Pembinaan yang dilakukan ini salah satunya adalah program pendampingan. Melalui pendampingan, Yayasan Kuncup Mas mencoba membantu mengatasi persoalan yang dihadapi anak jalanan, membimbing mereka agar dapat menerapkan hak partisipasi dalam menentukan sesuatu, baik kegiatan yang berhubungan dengan kerja maupun kebutuhan lainnya. Dalam penanganan masalah anak jalanan, Yayasan Kuncup Mas melakukan pendekatan dengan menarik anak dari jalanan kemudian diberikan pendidikan berupa kursus ataupun diberi bantuan usaha dengan terlebih dahulu memberikan keterampilan terkait usaha yang akan dirintisnya, seperti pemberian keterampilan sablon. Namun pendekatan ini tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Anak-anak itu kembali turun kejalan. Alasannya beragam, salah satunya karena mereka menganggap pasar tidak menyerap karya mereka. Masalah lainnya adalah inkonsistensi. Anak jalanan kurang bisa mempertahankan apa yang sudah diusahakannya. Misalnya semula memutuskan membuka warung kopi, namun bisa segera berbalik arah jika menemui hambatan. Kembali turun ke jalan lagi menjadi pilihan mereka, karena itu perlu bimbingan dan pengawasan dari pihak yang peduli terhadap mereka. Selain itu Yayasan Kuncup Mas pada tahun 2011 telah menyalurkan bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada

sekitar 35 orang anak jalanan. Namun penyaluran bantuan tersebut tidak langsung diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang-barang yang mendukung terhadap proses belajar anak di sekolah seperti sepatu, tas sekolah, buku dan alat tulis, bahkan sepeda yang nantinya bisa digunakan anak untuk berangkat ke sekolah masing-masing.

Selama ini dalam praktiknya, Dinas Sosial belum optimal dalam menangani masalah anak jalanan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan di Kabupaten Banyumas, yakni faktor internal yang berasal dari dalam Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari anak jalanan. Faktor yang berasal dari dalam adalah adanya penyatuan instansi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan terlalu luasnya bidang garapan instansi tersebut dalam pembagian tugas pokok dan fungsi instansi. Dinas Sosial yang disatukan dengan instansi lain yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat fokus kerja dinas sosial tidak terkonsentrasi pada satu permasalahan. Kepala Dinas harus memikirkan berbagai permasalahan yang kompleks secara bersama-sama dalam satu waktu. Selain itu permasalahan internal yang muncul adalah Dinas Sosial pada tingkatan kabupaten atau kota tidak diberikan kebebasan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang bisa digunakan untuk membuat program penanganan anak jalanan. Saat ini Dinas Sosial pada tingkatan kabupaten atau kota hanya berperan melaksanakan program yang telah digariskan oleh Dinas sosial Provinsi sehingga mereka tidak leluasa untuk memformulasikan pola pembinaan yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak jalanan di daerahnya masing-masing. Hal itu menjadi tanda kurangnya kepercayaan Departemen Sosial dan pemerintah provinsi dalam penanganan anak jalanan.

Hambatan lainnya adalah belum adanya program pembinaan anak jalanan secara khusus yang mengarah pada pengembangan nilai dan moral. Pembinaan tidak menyentuh permasalahan etika dan perilaku yang menjadi bagian dari permasalahan anak jalanan. Padahal permasalahan perilaku dan etika ini selalu menjadi sorotan masyarakat yang harus segera dicari solusinya. Program yang sekarang dijalankan terkesan hanya seperti ritual rutin yang setelah berjalan tinggal menunggu program selanjutnya turun. Padahal untuk mendapatkan hasil pembinaan yang maksimal diperlukan pola yang tepat yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial secara keseluruhan. Surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai langkah-langkah strategis penanganan anak jalanan yang salah satunya adalah menekankan pada program pemberdayaan keluarga maupun masyarakat yang secara efektif dapat menanggulangi masalah kemiskinan pada umumnya yang masih menjadi permasalahan utama keberadaan anak-anak di jalanan, ternyata pada tataran pelaksanaan masih belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. Penanganan terhadap anak jalanan harus disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan sehingga program yang ada menjadi tepat sasaran. Hambatan selanjutnya adalah Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli yang fokus menangani anak jalanan secara langsung, namun pelaksanaannya diserahkan ke pihak ketiga. Hal ini menyebabkan ketidakseriusan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan. Selain itu tidak ada *follow up* atau pemantauan

terhadap anak jalanan yang sudah dibina, sehingga anak jalanan lebih suka turun atau kembali lagi ke jalan daripada kembali ke keluarganya.

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu anak jalanan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas tidak semua adalah warga Kabupaten Banyumas sehingga mereka tidak menjadi objek sasaran pembinaan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sesuai aturan yang ada, pembinaan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk warga Kabupaten dan Kota tersebut saja yang dibuktikan dengan adanya surat identitas. Padahal ketika di lapangan, anak jalanan yang beroperasi di suatu daerah lebih banyak berasal dari wilayah lain. Ini terjadi karena mereka merasa malu jika harus beroperasi di wilayahnya sendiri karena sudah pasti akan banyak yang mengenali mereka. Hal ini menyebabkan tidak semua anak jalanan di suatu daerah dapat diikutsertakan dalam pembinaan, yang dampaknya anak jalanan tetap banyak di suatu daerah. Faktor kedua adalah, tidak adanya kemauan anak jalanan untuk mengubah hidupnya sendiri, sehingga mereka selalu turun lagi ke jalan walaupun sudah diberikan pembinaan. Cara instan dalam mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak di jalanan menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi mereka. Bahkan beberapa dari mereka sudah menjadikannya sebagai profesi turun-temurun hingga ke anak cucu. Inilah yang selama ini menjadi kendala tersulit dalam pemberantasan anak jalanan.

3. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Pendidikan Nilai dan Moral bagi Anak Jalanan dalam Mengembangkan *Smart and Good Citizen*.

Konsep pendidikan nilai secara teoritik merupakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Adalah suatu kenyataan bahwa proses belajar memang tidaklah terjadi dalam ruang bebas-budaya tetapi dalam masyarakat yang syarat-budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan. Oleh karena itu, proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk di dalamnya yang berbudaya.

Konsep dan proses pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi kehidupan dengan baik, dalam arti selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu tepat sekali dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang "*smart and good*". Pendidikan yang dimaksud dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam istilah lain yang dikenal *citizenship education* atau *education for citizenship*, Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Istilah *citizenship education* digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk *character education* atau pendidikan watak, karakter dan *teaching personal ethics and virtues*

atau pendidikan etika dan kebajikan. Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah *citizenship education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik. Hal ini dikuatkan oleh Sapriya (2006:189). Menurutnya “pada salah satu domain PKn yaitu sebagai program sosial kultural, maka program PKn dapat dikembangkan untuk pembinaan warganegara yang ada di lingkungan masyarakat tertentu di luar program sekolah”. Program inipun tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan dimensi PKn lainnya. Lingkungan masyarakat merupakan kumpulan individu yang pluralis baik tingkat pendidikan, pengetahuan, persepsi, kepentingan, bahkan cita-cita dan harapannya. Tantangan yang dihadapinya pun dari hari ke hari semakin menunjukkan kompleksitas yang meningkat. PKn sebagai program sosial kultural memang telah dan sedang berjalan dan terjadi di Masyarakat. Namun pelaksanaan dari program tersebut sedikitnya ada dua bentuk, yakni yang disengaja sebagai program pendidikan sehingga menimbulkan dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan yang tidak disengaja yang hasilnya dapat dikategorikan sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*) dari sebuah kegiatan.

Didasarkan pada teori tersebut maka Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya memiliki bidang garapan yang lebih luas. Artinya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula mencakup pendidikan di masyarakat. Untuk itulah Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula diterapkan sebagai bagian dari solusi atas permasalahan anak jalanan terutama dalam pembinaan nilai dan moral terhadapnya sehingga diharapkan dapat mengembangkan *Smart and Good Citizen*. Kecerdasan tidak semata-mata berkenaan dengan aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif tetapi tetapi melingkupi segala potensi individu yang meliputi kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional.

Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara, sebab warga negara yang cerdas harus memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kompetensi merupakan sejumlah kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Anak jalanan sebagai bagian dari warga negara merupakan bagian penting dari eksistensi negara yang sudah barang tentu dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Untuk itu pelaksanaan pembinaan bagi anak jalanan seyogyanya berorientasi kepada pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan.

4. Konstruksi Pendidikan Nilai dan Moral yang Dibutuhkan oleh Anak Jalanan dalam Mengembangkan *Smart and Good Citizen*.

Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dilakukan secara holistik mengacu kepada visi atau *grand design* pembangunan

kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan.

Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial. Model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan, melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Kebijakan dan program perlindungan sosial bagi anak jalanan harus mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka. Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan.

Secara garis besar ada beberapa alternatif model penanganan anak jalanan, yaitu penanganan anak jalanan yang dipusatkan di jalan dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan. Selain itu model lain penanganan anak jalanan adalah yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya. Model lain yang bisa ditawarkan yakni penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *community development* untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Selanjutnya adalah model penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara maupun permanen, terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat. Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara, Rumah Singgah atau *open house* yang menyediakan fasilitas panti dan asrama adaptasi bagi anak jalanan. Tetapi yang terpenting, apapun pilihan model maupun tempat penyelenggaraannya, harus benar-benar membekali anak jalanan dengan penguatan dari sisi nilai dan moral, baik nilai kemasyarakatan maupun nilai agama. Pendidikan nilai dan moral bagi anak jalanan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. Secara umum pembudayaan yang dimaksud adalah proses pengembangan nilai, norma dan moral dalam diri individu melalui proses perlibatan mereka dalam proses pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya dapat ditekankan pula bahwa proses pembudayaan harus menuju ke arah kemajuan dalam adab dan budaya, dengan tetap mengakomodasikan unsur-unsur yang dinilai baru, yang secara substantif bersumber dari kebudayaan asing. Semua itu harus dilakukan dalam rangka mengembangkan atau memperkaya kebudayaan asli serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam konteks itu, pendidikan nilai dan moral bagi anak jalanan dilakukan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu maka proses pendidikan nilai dan moral bagi

anak jalanan seyogianya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak sehingga terbentuk insan yang berperilaku dan berkarakter yang baik (*good character*).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa butir simpulan sebagai berikut:

1. Fenomena anak jalanan di Kabupaten Banyumas khususnya di Wilayah Purwokerto, anak-anak yang berprofesi sebagai anak jalanan tidak semua adalah warga yang berdomisili di Purwokerto. Sebagian dari mereka adalah pendatang dari tetangga kota Purwokerto. Adapun mereka yang asli Purwokerto kebanyakan adalah warga dari Kampung Sri Rahayu atau orang Purwokerto sendiri lebih mengenalnya dengan Kampung Dayak. Sementara yang berdomisili di Banyumas adalah anak-anak pemungut koin yang berasal dari Daerah Pageralang. Alasan anak jalanan turun ke jalan lebih sering dipengaruhi oleh desakan kehidupan keluarga.
2. Selama ini dalam praktiknya, Dinas Sosial belum optimal dalam menangani masalah anak jalanan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat berupa faktor internal yang berasal dari dalam Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari diri anak jalanan. Faktor yang berasal dari dalam adalah; 1) adanya penyatuan instansi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas menyebabkan terlalu luasnya bidang garapan instansi tersebut sehingga membuat fokus kerja dinas sosial tidak terkonsentrasi pada satu permasalahan; 2) Dinas Sosial pada tingkatan kabupaten atau kota tidak diberikan kebebasan untuk pengelolaan keuangan yang bisa digunakan untuk membuat program penanganan anak jalanan; 3) belum adanya program khusus untuk mengatasi masalah anak jalanan yang terfokus pada pembinaan nilai moral dan disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan. 4) Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli yang fokus menangani anak jalanan yang menangani secara langsung pembinaan anak jalanan. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah; 1) anak jalanan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas tidak semua adalah warga Kabupaten Banyumas sehingga mereka tidak menjadi objek sasaran pembinaan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sesuai aturan yang ada, pembinaan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk warga Kabupaten dan Kota tersebut saja; dan 2) tidak adanya kemauan anak jalanan untuk merubah hidupnya sehingga mereka selalu turun lagi kejalan walaupun sudah diberikan pembinaan.
3. Pemilihan model dan tempat pembinaan bagi anak jalanan harus lebih dapat memberikan penguatan dari sisi nilai dan moral. Dalam hal ini PKn dapat memberikan peran dalam pendidikan nilai moral bagi anak jalanan karena pada dasarnya PKn dalam istilah *citizenship education* digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pendidikan watak, karakter, pendidikan etika dan kebajikan. Pkn dalam istilah *citizenship education* juga lebih cenderung digunakan dalam visi

yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik.

Berdasarkan simpulan di atas, direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan pemisahan antara Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan Dinas Sosial. Dengan pemisahan diharapkan kinerja aparatur tiap dinas akan semakin terfokus pada ruang garapan masing-masing.
2. Adanya pemberian kewenangan yang lebih luas pada pemerintah kabupaten atau kota untuk merancang dan melaksanakan pembinaan anak jalanan beserta pengelolaan keuangannya supaya program yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.
3. Penghapusan aturan bahwa yang dapat diikuti dalam pembinaan anak jalanan hanya warga suatu wilayah yang bersangkutan saja yang dibuktikan dengan surat identitas. Karena pada dasarnya anak jalanan yang beroperasi tidak hanya warga asli wilayah tersebut, tetapi juga merupakan warga pendatang dari wilayah lain. Sehingga nantinya sasaran pembinaan lebih ditekankan pada wilayah operasi anak jalanan tersebut agar nantinya pembinaan mengenai semua anak jalanan.
4. Memaksimalkan peran LSM dan masyarakat dengan membangun basis pendidikan alternatif seperti membuat sanggar anak jalanan sebagai sarana menumbuhkan kreativitas dan produktivitas, membuat suatu lembaga pendidikan yang bertugas melakukan pendekatan intensif dalam menghadapi kenakalan dan ulah anak jalanan serta menumbuhkan kesadaran untuk maju dari diri jalanan anak jalanan itu sendiri.
5. Perlu penanganan yang serius untuk mengatasi masalah anak jalanan. Pembinaan yang dilakukan tidak semata-mata hanya menjalankan rutinitas program yang tanpa makna, tetapi harus diiringi dengan *follow up* yang baik. Program pembinaan yang dilakukan selama ini tidak disertai oleh pembinaan nilai dan moral. Untuk itu harus dibuat suatu program khusus untuk pembinaan anak jalanan yang tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan yang selama ini menjadi alasan anak jalanan turun kejalan, tetapi juga mengedepankan pendidikan nilai dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B. & Huberman, A. M. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sapriya. (2006). *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis PKn dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi SPs UPI: tidak diterbitkan.
- _____ (2006). *Warganegara dan Teori Kewarganegaraan*. Dalam Budimansyah, Dasim dan Syaifullah Syam (Ed). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan: Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H. A. Kosasih Djahiri*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Strauss, A. & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Terjemahan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien dari judul *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Banyumas No. 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.